

SKRIPSI

**PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) SEBAGAI
SALAH SATU SARANA PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK
STUDI KASUS : P.T. BANK LIPPO Tbk.**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**



IKE WULANDARI

NIM : 030015059

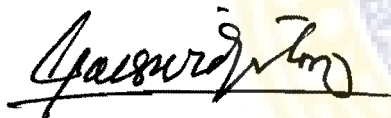
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) SEBAGAI
SALAH SATU SARANA PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK
STUDI KASUS : P.T. BANK LIPPO Tbk.**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Pembimbing



H. AGUS WIDYANTORO, S.H., M.H.
NIP. 131855883

Penyusun



IKE WULANDARI
NIM : 030015059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2004**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Hj. Mas Rahmah, S.H., M.H.

Anggota : H. Agus Widyantoro, S.H., M.H.

M. Zaidun, S.H., M.Si

Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Setiap perusahaan publik harus melakukan prinsip disclosure untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemegang saham dan pihak – pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut antara lain dalam bentuk laporan keuangan kepada publik. Laporan keuangan ganda untuk periode yang sama menimbulkan *misleading information* dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan, sehingga PT. Bank Lippo Tbk. selaku emiten harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pemegang saham publik akibat pelanggaran prinsip keterbukaan tersebut.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham publik yang dirugikan karena *misleading information* :
 - a. Gugatan Perdata berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum.
 - b. Gugatan perdata berdasarkan wanprestasi.
 - c. Gugatan Class Action.
 - d. Laporan kepada Bapepam dengan disertai permohonan agar Bapepam melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya untuk menerapkan sanksi administratif.

Saran

Hal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus ini adalah :

- a. Sistem penalti yang menimbulkan kejeraan dari pelaku pelanggaran aturan perundang – undangan yakni dengan menerapkan sanksi dengan tegas.
- b. Melarang keterlibatan dari pihak – pihak yang jelas telah memanipulasi – data perbankan dan pasar modal di dalam pengelolaan bank, baik sebagai komisaris maupun sebagai manajemen bank.

